

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berjumlah 29 kabupaten dan 6 kota untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, serta 4 kabupaten dan 1 kota untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua Provinsi ini berdekatan yang terletak di selatan pulau Jawa. Pemerintah kabupaten/kota yang menjadi objek penelitian ini berjumlah 40 kabupaten/kota, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Nama-Nama Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota
1.	Kota Yogyakarta
2.	Bantul
3.	Sleman
4.	Gunung Kidul
5.	Kulon Progo
6.	Kota Semarang
7.	Kabupaten Semarang
8.	Salatiga
9.	Demak
10.	Kudus
11.	Pati
12.	Jepara
13.	Rembang
14.	Surakarta
15.	Boyolali
16.	Klaten
17.	Sukoharjo

No	Kabupaten/Kota
18.	Blora
19.	Grobogan
20.	Karanganyar
21.	Sragen
22.	Banjarnegara
23.	Kebumen
24.	Cilacap
25.	Purbalingga
26.	Kota Magelang
27.	Kabupaten Magelang
28.	Purworejo
29.	Temanggung
30.	Wonosobo
31.	Kota Pekalongan
32.	Kabupaten Pekalongan
33.	Banyumas
34.	Batang
35.	Kendal
36.	Kota Tegal
37.	Kabupaten Tegal
38.	Brebes
39.	Pemalang
40.	Wonogiri

Data penelitian ini Jumlah data (N) sebanyak 160, data didapat dari Laporan Realisasi Anggaran dan PDRB dalam pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010 sampai tahun 2013 yang diperoleh dari BPK, DPKAD (Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), dan Badan Pusat Statistik.

B. Statistik Deskriptif

Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai rasio Belanja Modal, rasio Dana Alokasi Umum, rasio Dana Alokasi Khusus, rasio

Pendapatan Asli Daerah, rasio Bantuan Keuangan, dan rasio Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DIY dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, maka statistik deskriptif yaitu minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi variabel penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	160	36.11	97.10	76.2277	13.34025
DAU	160	99.94	100.06	99.9989	.01014
DAK	160	30.00	100.00	98.1330	7.94118
PAD	160	81.89	134.90	108.6914	10.38744
ABK	160	71.97	190.46	116.5144	19.02290
PP	160	.32	17.44	10.8521	1.77248
Valid N (listwise)	160				

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015.

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dari Jumlah N sampel sebesar 160, dimana rata-rata rasio belanja modal kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dan provinsi DIY dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebesar 76,2277 dengan nilai terendah sebesar 36,11 dan nilai tertinggi sebesar 97,10 dengan standar deviasi sebesar 13,34025. Belanja modal merupakan belanja fisik yang mempunyai kriteria umur manfaat lebih dari satu tahun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dan provinsi DIY yang diperoleh dari unsur pembiayaan dari dana transfer (DAU, DAK, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi) dan juga pendapatan asli daerah tersebut. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan

dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang diperhitungkan berdasarkan harga perolehan.

Tabel 4.2 diatas memperlihatkan, nilai rata-rata rasio DAU kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dan provinsi DIY dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebesar 99,9989 dengan nilai terendah sebesar 99,94 dan nilai tertinggi sebesar 100,06 dengan standar deviasi sebesar 0,1014. Dana alokasi umum merupakan dana perimbangan yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang dengan proporsi penentuan 26% dari Pendapatan Dalam Negri Netto.

Dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan yang juga dipersyaratkan dalam Undang-Undang dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan besaran ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Tabel 4.2 diatas memperlihatkan, nilai rata-rata rasio DAK kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dan provinsi DIY dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebesar 98,1330 dengan nilai terendah sebesar 30,00 dan nilai tertinggi sebesar 100,00 dengan standar deviasi sebesar 7,94118.

Table 4.2 diatas memperlihatkan, nilai rata-rata rasio PAD kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dan provinsi DIY dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebesar 108,6914 dengan nilai terendah sebesar 81,89 dan nilai tertinggi sebesar 134,90 dengan standar deviasi sebesar 10,38744. Pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

Menurut Hardiningsih dan Oktaviani (2013) menyatakan bahwa bantuan keuangan merupakan belanja tidak langsung yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah desa di wilayahnya yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kabupaten/kota yang ada diwilayahnya. Sebagai wujud dalam proses mendukung desentralisasi fiskal yang sedang terjadi pemerintah provinsi sesuai amanat Pemendagri No. 13 tahun 2006 dapat mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, belanja hibah dan belanja bantuan sosial kepada pihak lain selama urusan wajib maupun urusan pilihan yang dialokasikan oleh pemerintah telah dipenuhi terlebih dahulu. Tabel 4.2 diatas memperlihatkan nilai rata-rata rasio BK kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dan provinsi DIY dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebesar 116,5144 dengan nilai tertendah sebesar 71,97 dan nilai tertinggi sebesar 190,46 dengan standar deviasi sebesar 19,02290.

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Konsep pendapatan nasional yang biasa dipakai dalam menghitung pendapatan perkapita pada umumnya adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB). Tabel 4.2 diatas memperlihatkan nilai rata-rata rasio pendapatan perkapita kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dan provinsi DIY sebesar 10,8521 dengan nilai terendah sebesar 0,32 dan nilai tertinggi sebesar 17,44 dengan standar devisasi sebesar 1,77248.

C. Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis dengan metode regresi berganda dan regresi sederhana, diperlukan uji asumsi klasik atas model yang digunakan untuk memastikan bahwa dalam penelitian data yang digunakan berdistribusi secara normal, tidak terjadi multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal data normal atau mendekati normal. Penelitian ini menggunakan uji normalitas data yaitu uji analisis *Kolmogorov Smirnov Z Test*. Uji normalitas merupakan asumsi bahwa setiap variabel berdistribusi normal. Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 berarti data berdistribusi normal (Ghozali, 2006).

Berikut ini adalah uji statistik untuk menguji normalitas data yaitu uji *Kolmogorov Smirnov Z*.

Tabel 4.3
Hasil Uji *One-Sampel Kolmogorov Smirnov Test*
(Persamaan 1)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			160
Normal Parameters	a,b	Mean	.0000000
		Std. Deviation	12.30640864
Most Extreme Differences		Absolute	.101
		Positive	.067
		Negative	-.101
Kolmogorov-Smirnov Z			1.276
Asymp. Sig. (2-tailed)			.077

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015.

Tabel 4.3 diatas menjelaskan dengan uji statistik untuk menguji normalitas data yaitu uji *Kolmogorov Smirnov Z*. Berdasarkan pada Tabel 4.3 tersebut pada persamaan 1, uji normalitas terhadap data residual menunjukkan bahwa besarnya *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,077 diatas signifikan 0,05. Berdasarkan analisis statistik di atas dapat diketahui bahwa model regresi telah memenuhi asumsi uji normalitas.

Tabel 4.4
Hasil Uji *One-Sampel Kolmogorov Smirnov Test*
(Persamaan 2)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			160
Normal Parameters	a,b	Mean	.0000000
		Std. Deviation	1.76803028
Most Extreme Differences		Absolute	.091
		Positive	.069
		Negative	-.091
Kolmogorov-Smirnov Z			1.152
Asymp. Sig. (2-tailed)			.141

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015.

Tabel 4.4 diatas menjelaskan dengan uji statistik untuk menguji normalitas data yaitu uji *Kolmogorov Smirnov Z*. Berdasarkan pada Tabel 4.4 tersebut pada persamaan 1, uji normalitas terhadap data residual menunjukkan bahwa besarnya *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,141 diatas signifikan 0,05. Berdasarkan analisis statistik di atas dapat diketahui bahwa model regresi telah memenuhi asumsi uji normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolineritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Uji ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Nilai *cut-off* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 dan nilai *VIF* 10 sehingga data yang dianggap tidak terkena multikolinearitas yaitu data yang dianggap tidak terkena multikolearitas yaitu data yang memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* kurang dari 10.

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas: Nilai *Tolerance* dan *VIF*
(Persamaan 1)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-20554.0	9829.1		-2.091	.038		
	DAU	205.647	98.298	.156	2.092	.038	.984	1.017
	DAK	.522	.126	.311	4.155	.000	.981	1.019
	PAD	.223	.099	.173	2.252	.026	.927	1.079
	ABK	-.083	.053	-.118	-1.551	.123	.951	1.052

a. Dependent Variable: BM

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015.

Hasil uji pengujian *tolerance* pada persamaan 1 berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10. Hasil perhitungan *VIF* juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *VIF* lebih dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi diatas.

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas: Nilai *Tolerance* dan *VIF*
(Persamaan 2)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.134	.816		12.422	.000		
	BM	.009	.011	.071	.893	.373	1.000	1.000

a. Dependent Variable: PP

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015.

Hasil uji pengujian *tolerance* pada persamaan 1 berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance*

$> \alpha (0,05)$. Hal ini menunjukkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas: Uji Glejser
(Persamaan 2)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.062	.578		3.569	.000
	BM	-.011	.007	-.115	-1.450	.149

a. Dependent Variable: Residual absolut

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015.

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas, menunjukkan bahwa dalam penelitian tiap model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai sig. $> \alpha (0,05)$. Hal ini menunjukkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi menunjuk pada hubungan yang terjadi antara anggota-anggota dari serangkaian observasi yang terletak berderetan secara *series* dalam bentuk waktu (*time series*) atau hubungan antara tempat yang berdekatan (*cross sectional*). Uji autokorelasi menggunakan uji *Run Test*, dimana bila nilai Sig $> \alpha (0,05)$ maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dan sebaliknya jika nilai Sig. $< \alpha (0,05)$ maka terjadi gejala autokorelasi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi: Uji *Run Test*
(Persamaan 1)

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	2.35854
Cases < Test Value	80
Cases >= Test Value	80
Total Cases	160
Number of Runs	74
Z	-1.110
Asymp. Sig. (2-tailed)	.267

a. Median

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015.

Hasil uji autokorelasi pada Tabel 4.9 dengan *Run Test* diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0.267 yang lebih besar dari nilai Sig. > α (0,05), sehingga dinyatakan tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model penelitian.

Tabel 4.10
Hasil Uji Autokorelasi: Uji *Run Test*
(Persamaan 2)

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.20860
Cases < Test Value	80
Cases >= Test Value	80
Total Cases	160
Number of Runs	70
Z	-1.745
Asymp. Sig. (2-tailed)	.081

a. Median

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015.

Hasil uji autokorelasi pada Tabel 4.10 dengan *Run Test* diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0.081 yang lebih besar dari nilai Sig. > α (0,05), sehingga dinyatakan tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model penelitian.

D. Hasil Analisis dan Pengujian Hipotesis

1. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pada persamaan 1 pengaruh variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan terhadap Belanja Modal. Untuk mengetahui seberapa besar dan bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Hasil Uji Regresi Berganda
(Persamaan 1)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-20554.0	9829.070		-2.091	.038
	DAU	205.647	98.298	.156	2.092	.038
	DAK	.522	.126	.311	4.155	.000
	PAD	.223	.099	.173	2.252	.026
	ABK	-.083	.053	-.118	-1.551	.123

a. Dependent Variable: BM

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015.

Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 4.11, diperoleh persamaan fungsi regresi linear berganda sebagai berikut:

$$BM = 0,223PAD + 205,647DAU + 0,522DAK - 0,083BK$$

Variabel PAD memiliki nilai t sebesar 2,252 probabilitas signifikansinya sebesar $0,026 < 0,05$ dan memiliki arah hubungan B sebesar 0,223 menunjukkan arah positif, maka H_1 diterima.

Kesimpulannya pendapatan asli daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja modal dalam LKPD pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dan provinsi DIY.

Variabel DAU memiliki nilai t sebesar 2,092 probabilitas signifikansinya sebesar $0,038 < 0,05$ dan memiliki arah hubungan B sebesar 205,647 menunjukkan arah positif, maka **H_2 diterima**. Kesimpulannya dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam LKPD pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dan provinsi DIY.

Variabel DAK memiliki nilai t sebesar 4,155 probabilitas signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$ dan memiliki arah hubungan B sebesar 0,522 menunjukkan arah positif, maka **H_3 diterima**. Kesimpulannya dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam LKPD pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dan provinsi DIY

Variabel BK memiliki nilai t sebesar -1,551 probabilitas signifikansinya sebesar $0,123 > 0,05$ dan memiliki arah hubungan B sebesar -0,83 menunjukkan arah negatif, maka dapat disimpulkan **H_4 ditolak**. Kesimpulannya bantuan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal LKPD pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dan provinsi DIY.

Tabel 4.12
Hasil Uji F
(Persamaan 1)

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4215.827	4	1053.957	6.784	.000 ^a
	Residual	4080.183	155	155.356		
	Total	8296.011	159			

a. Predictors: (Constant), ABK, DAK, DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015.

Dari hasil pengujian nilai F pada Tabel 4.12, terlihat bahwa nilai F = 6,784 dengan probabilitas signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama belanja modal dapat di jelaskan secara signifikan oleh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), bantuan keuangan (BK).

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi
(Persamaan 1)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.386 ^a	.149	.127	12.46419

a. Predictors: (Constant), ABK, DAK, DAU, PAD

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015.

Pada tabel 4.13, diketahui bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R Square* karena regresi berganda dan nilainya sebesar 0,127. Hal ini menjelaskan 12,7% variasi belanja modal dapat dijelaskan secara signifikan oleh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), bantuan

keuangan (BK), sedangkan sisanya 87,3% belanja modal dijelaskan oleh variabel lain.

2. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pada persamaan 2 yaitu variabel independen Belanja Modal terhadap Pendapatan Perkapita. Untuk mengetahui seberapa besar dan bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14
Hasil Uji Regresi Sederhana
(Persamaan 2)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.134	.816		12.422	.000
BM	.009	.011	.071	.893	.373

a. Dependent Variable: PP

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015.

Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 4.14, diperoleh persamaan fungsi regresi sederhana sebagai berikut:

$$PP = 0,009BM$$

Variabel belanja modal memiliki nilai t sebesar 0,893 probabilitas signifikansinya sebesar $0,373 > 0,05$ dan memiliki arah hubungan B sebesar 0,009 menunjukkan arah positif, maka H_5 ditolak. Kesimpulannya belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita

pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dan provinsi DIY.

Tabel 4.15
Hasil Uji F
(Persamaan 2)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.507	1	2.507	.797	.373 ^a
	Residual	497.023	158	3.146		
	Total	499.530	159			

a. Predictors: (Constant), BM

b. Dependent Variable: PP

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015.

Dari hasil pengujian nilai F pada Tabel 4.15, terlihat bahwa nilai F = 0,797 dengan probabilitas signifikansi sebesar $0,373 > 0,05$, maka dapat disimpulkan pendapatan perkapita tidak dapat dijelaskan secara signifikan oleh belanja modal.

Tabel 4.16
Hasil Uji Koefisien Determinasi
(Persamaan 2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.071 ^a	.005	-.001	1.77362

a. Predictors: (Constant), BM

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015.

Pada tabel 4.15, diketahui bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai *R Square* karena regresi sederhana dan nilainya sebesar 0,05. Hal ini menjelaskan 0,5% variasi pendapatan perkapita dapat

dijelaskan secara signifikan oleh belanja modal (BM), sedangkan sisanya 95,5% pendapatan perkapita dijelaskan oleh variabel lain.

E. Pembahasan (Interpretasi)

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel PAD membuktikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Oktaviani (2013) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak signifikan berpengaruh terhadap belanja modal. Sebaliknya, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswanto (2012) menemukan hubungan positif dan signifikan yang kuat antara pendapat asli daerah dan belanja modal, hasil ini dikuatkan oleh Nuarisa (2013) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tak perlu dibayar lagi oleh pemerintah (Wahyuni, 2011). Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk itu, dalam kepentingan jangka pendek pungutan yang bersifat retribusi lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasar pungutan ini berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan (Abrar, 2010 dalam Lilis dan

Yohana, 2012). Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Supardi (2008) dalam Lilis dan Yohana (2012) bahwa peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu usaha untuk mengatasi pembiayaan urusan penyelenggaraan pemerintah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah. Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan oleh peraturan undang-undang, selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa atas pungutan atas dasar persetujuan pemerintah pusat.

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah pada pemerintah kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah dan provinsi DIY dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi, dan apabila pemerintah daerah memiliki PAD rendah maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal juga semakin rendah.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel DAU membuktikan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hardiningsih dan dan Oktaviani (2013) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Megawati (2013) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum

secarata statistik tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Sebaliknya, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Harianto dan Hari (2007) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Belanja Modal.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah satu dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpanagn fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum yang pengalokasiannya menekankan aspek peraturan dan keadilan yang selaras dengan penyenggaraan urusan pemerintah (UU No. 32/2004). Sehingga penggunaan dana ini diharapkan untuk keperluan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang merupakan tuntutan dari otonomi daerah. Jika kondisi masyarakat menjadi lebih baik maka pembangunan manusia akan berhasil pula. Jadi yang dipikirkan selama ini bukan hanya alokasi tinggi bagi kemajuan daerah yang dilihat dari kekayaan, melainkan juga juga pengalokasian dana yang lebih tinggi bagi belanja untuk peningkatan kesejahteraan (Lilis dan Yohana, 2012).

Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah yaitu DAU, dengan alokasi pengeluaran daerah melalui alokasi belanja modal. Semakin tinggi DAU pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dan DIY dari tahun

2010 sampai dengan tahun 2013 maka alokasi belanja modal juga meningkat. Sehingga daerah yang memiliki pendapatan DAU yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja modal akan semakin besar.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel DAK membuktikan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pemerolehan dan pemanfaatan DAK harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam prioritas nasional. Daerah dapat menerima DAK apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu (1) kriteria umum berdasarkan *Indeks Fiskal Netto*; (2) kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah; dan (3) kriteria teknis berdasarkan Indeks Teknis bidang terait (UU No.32/2004 dan UU No. 33/2004). Dalam kaitannya dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, fungsi DAK sebenarnya hanya sebagai penambah atau pelengkap jenis dana perimbangan lainnya. Namun, dalam perkembangannya keberadaan DAK menjadi semakin penting bagi pembangunan daerah (Usman dkk, 2008 dalam Lilis dan Yohana, 2012).

Hasil penelitian ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh Nuarisa (2013) bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal. Namun sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan dan Oktaviani (2013) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah yaitu DAK, dengan alokasi pengeluaran daerah melalui alokasi belanja modal. Semakin tinggi DAK pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dan DIY dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 maka alokasi belanja modal juga meningkat. Sehingga daerah yang memiliki pendapatan DAK yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja modal akan semakin besar.

4. Pengaruh Bantuan Keuangan Terhadap Belanja Modal

Hasil hipotesis untuk variabel BK, membuktikan bahwa bantuan keuangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ikbal (2011) menyatakan bahwa secara umum implemenlasi undang-undang perimbangan keuangan mempunyai pengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Abdullah dan dan Halim (2006) dalam Hardiningsih dan Oktaviani (2013) menyatakan bahwa pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Ini diperkuat oleh Hardiningsih dan Oktaviani (2013) bahwa bantuan keuangan berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

Alokasi bantuan keuangan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota menjadi pendapatan yang diperuntukan untuk belanja modal yang dialokasikan pada beberapa bidang yaitu prasarana, pendidikan, kemasyarakatan yang tujuannya untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota, namun alokasi tiap kabupaten/kota berbeda dan alokasi bantuan tersebut jumlahnya fluktuatif tergantung kemampuan keuangan provinsi (Hardingsih dan Oktaviani, 2013).

Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah yaitu BK, dengan alokasi pengeluaran daerah melalui alokasi belanja modal. Semakin tinggi BK pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dan DIY dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 maka alokasi belanja modal juga belum tentu meningkat. Sehingga daerah yang memiliki pendapatan BK yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja modal tidak semakin besar.

5. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Perkapita

Hasil hipotesis untuk variabel BM membuktikan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Adi (2006) dalam Hardingsih dan Oktaviani menyatakan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat

produktifitas penduduk. Ini diperkuat oleh penelitian Hardiningsih dan Oktaviani (2013) menyatakan bahwa perubahan belanja modal berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. Namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian Bambang (2013) bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti semakin tinggi desentralisasi fiskal semakin rendah pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan perkapita menjadi dasar karena lebih akurat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Pendapatan perkapita dihitung berdasarkan jumlah PDRB dibanding jumlah penduduk, jumlah PDRB merupakan jumlah produk yang dihasilkan oleh masyarakat disuatu wilayah yang berasal dari sektor perdagangan, jasa, perindustrian maupun pendapatan lain. Penentu pendapatan perkapita juga diperoleh dengan menghitung hasil dari masyarakat, walaupun masyarakat tersebut tidak berdomisili di wilayah tersebut. Pengadaan belanja modal oleh pemerintah melalui pengalokasian belanja modal yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah dan memberikan akses guna menunjang pertumbuhan ekonomi (Hardiningsih dan Oktaviani, 2013).

Jika dilihat dari hasil hipotesis ini menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten/kota provinsi Jawa tengah dan provinsi DIY dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dengan porsi anggaran belanja modal yang tinggi tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi

yang tercermin pada pendapatan perkapita. Sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu untuk lebih bijak dalam penggunaan belanja modal, jika dilihat dari LKPD pada masing-masing pemerintah daerah dari tahun ke tahun selalu naik, berarti hal ini pemerintah daerah harus lebih optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi pembiayaan yang tidak perlu, dan fokus untuk membiayai untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah seperti dialokasikan pada pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur. Sebab dengan tersedianya sarana dan prasana serta infrastruktur yang baik dan mumpun maka mobilisasi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka akan semakin bergairah. Tentu hal ini harus didukung oleh pemerintah daerah dan bersinegri dengan masyarakat, dalam kaitan ini pemerintah menyediakan sarana dan prasaran serta insfratuktrur yang baik, dan kaitannya pada masyarakat, diharapkan masyarakat agar lebih bijak dalam membayar kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan taat membayar pajak serta kewajiban-kewajiban lainnya untuk memperoleh pendapatan daerah yang lebih optimal. Maka dengan bersinegri antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pemerintah akan mampu dan tersedianya dana untuk membiayai pembangunan sarana dan prasaran serta insfraktuktur untuk menaikkan pertumbuhan perkonomian masyarakat yang tercermin pada pendapatan perkapita.